



jogja
istimewa

matajendela
SENI BUDAYA YOGYAKARTA
VOLUME X NOMOR 4/2015



Foto: Kuss Indarto

EDITORIAL

- 2** Menghadang Ironi-ironi di Dunia Wisata

JENDELA

- 4** Menyematkan Nalar Budaya Pada Pariwisata
13 Pariwisata dan Ironi Masyarakat (Bekas) Jajahan
17 Pembangunan Kota dan Munculnya Rasa Gelisah
23 Galeri Seni Kontemporer Sebagai Agen Persebaran Pengetahuan

LINTAS

- 26** FBU 2015: Frankfurt Book Unfair 2015
35 Pendidikan Sebagai Sarana Kelola Kebudayaan

Penanggungjawab Umum

Drs. Umar Priyono, M.Pd.

Penanggungjawab Teknis

Drs. Diah Tutuko Suryandaru

Penanggungjawab Produksi

Dra. Siswati

Penanggungjawab Anggaran

Drs. Anton Widodo

Penanggungjawab Redaksional

Suwarno Wisetrotomo

Sekretariat

Suroto, Bejo, Wahyudi,
Juijus W., Joko Setiawan

Redaktur

Kuss Indarto
Stanislaus Yangni
Satmoko Budi Santoso
Dra. M.Utun Wijayati
Dra. V. Retnaningsih
Nunuk Retnaningsih, S.S.

Editor

Nunung D. Puspitasari

Artistik

Andika Indrayana

Fotografi

Suprayitno Rudi Subagyo, Lukito

Diterbitkan oleh Taman Budaya Yogyakarta
Jl. Sriwedani No. 1 Yogyakarta 55123
Telp: (0274) 523512, 561914 Fax: (0274) 580771
Email: matajendela@yahoo.com
Website: www.thewindowofyogyakarta.com

Diproduksi di Yogyakarta

Kertas kaver: Beckett, Isi: Matte Paper

Huruf: PT Sans, Myriad Pro, DINCond-Light, Rosario, Cocon Light, Jogjakartype
Ilustrasi: www.freepik.com, www.freevectormaps.com

Matajendela, majalah seni budaya terbit selama tiga bulan sekali.
Redaksi menerima tulisan dari penulis, kritikus dan pemerhati seni budaya

Menghadang Ironi-ironi di Dunia Wisata

Di berbagai daerah di Indonesia terus bertumbuhan kawasan wisata; baik yang berupa desa wisata yang mengolah potensi desa setempat, maupun membangun obyek wisata. Geliat inisiatif warga masyarakat membangun desa wisata merupakan terobosan kreatif oleh suatu kelompok, atau masyarakat setempat, agar dapat menjadi pemain (aktor) dalam setiap perubahan. Karena itu, upaya tersebut sungguh pantas “disambut” oleh aparatus pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) maupun Pemerintah Provinsi.

Kreativitas warga masyarakat terkait desa wisata ini memiliki dampak kehidupan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Secara sosial, desa yang berhasil menawarkan wisata dan ‘diterima’ khalayak, meningkat rasa percaya dirinya, karena desanya dikenal, dan masuk dalam peta wisata. Secara ekonomi, warga tertantang untuk mengambil peran dalam berbagai sektor dan fasilitator;

dari jasa parkir, warung, penginapan, dan lain-lainnya. Semua kegiatan itu bernilai ekonomi.

Pada desa wisata yang baru, dan terkenal, perkara sosial-ekonomi akan mengalami guncangan, karena terjadi banyak perubahan atau setidaknya pergeseran. Misalnya tiba-tiba desanya dikunjungi banyak orang, bahkan (mungkin) turis mancanegara, dan sejumlah ‘orang asing’ lainnya. Tiba-tiba masyarakat setempat, biasanya tanpa persiapan ‘lahir-batin’ yang cukup, harus menjadi ‘tuan rumah’ yang kagok dan mungkin salah tingkah. Tak cukup referensi dan model bagaimana harus memantaskan diri menjadi tuan rumah yang baik, yang mampu melayani tetamunya. Karena tanpa pengetahuan yang cukup, salah satu dampaknya, misalnya kesan negatif bagi tamu-tamunya, terkait nilai-nilai seperti keramahan, pelayanan, dan fasilitas pendukung lainnya.

Situasi semacam itu akan merembet ke sektor yang berpotensi

ekonomi; harus bersiap jasa yang bernilai ekonomi seperti parkir, ojek, warung makan, penginapan, dan sebagainya. Tanpa kesiapan yang matang, baik prasarana-sarana, infrastruktur dan mentalitas, maka siapapun yang memiliki akses dan peluang lebih, dapat memanfaatkan situasi ini dengan leluasa. Maka siapapun, misalnya kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, berpeluang ‘menguasai’ sumber-sumber yang bernilai eknomi, karena memiliki modal (sosial dan ekonomi). Jika terjadi demikian, maka akan berakibat pemusatan pendapatan dan akses. Bisa diduga, kenyataan semacam itu akan berimplikasi pada aspek sosial-masyarakat, misalnya; kekerabatan/gotong royong memudar, kepercayaan luntur, sosok-sosok yang semula dijadikan panutan, karena ikut bermain atas nama kepentingan ekonomi, lalu tak lagi punya waktu untuk mengurus warganya. Kepercayaan menjadi luntur. Akhirnya, sebuah desa yang secara fisik

menjadi ramai dan terkenal, namun sesungguhnya kehilangan pemimpin dan kepemimpinan; tak ada lagi yang bisa bisa didengarkan dan dijadikan panutan. Kreativitas warga justru kontraproduktif bagi kekerabatan.

Belum lagi persoalan dampak ‘kue ekonomi’ yang tak merata. Contoh menarik adalah desa wisata Kalibiru, Hargowilis, Kokap, Kulon Progo. Desa wisata ini bisa dimasuki dari berbagai arah; timur, selatan, atau utara. Setiap jalur masuk, akan melewati desa atau kalurahan yang berbeda. Jika tak ada komunikasi antardesa, maka akan memicu konflik. Kasus semacam ini pernah terjadi di salah sebuah desa wisata di Gunung Kidul. Soal-soal semacam ini tidak bisa dianggap sepele, dan memerlukan manajemen yang sangat baik.

Ironi-ironi itu tidak saja berpotensi merugikan para pelancong atau tetamu di desa wisata, tetapi cepat atau lambat juga akan menumbangkan desa wisata itu. Mengapa? Karena para

tetamu juga kehilangan kenyamanan dan kepercayaan pada ‘tuan rumah’ alias pada warga masyarakat setempat yang tak mencerminkan sebagai tuan rumah yang baik dan benar. Tentu saja kenyataan seperti itu sangat ironis, dan sangat mungkin terjadi pada suatu desa wisata. Dalam skala yang lebih besar, ironiironi semacam itu bisa terjadi di kawasan wisata manapun.

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi yang memayungi kawasan tersebut sebaiknya segera “menyambut” ide-ide semacam itu, dalam konteks upaya menghadang potensi munculnya ironi-ironi. Kementerian Pariwisata, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Pariwisata semestinya terus-menerus berkoordinasi, bermitra dengan para pemangku kepentingan (*stake holder*) dan institusi lainnya, turun tangan melakukan pembelajaran terkait tata kelola pariwisata secara menyeluruh. Potensi berupa desa wisata harus mampu menopang kokohnya

kekerabatan masyarakat desa, yang berujung pada kesejahteraan. Mata Jendela kali ini dengan sengaja menurunkan tema utama tentang dunia pariwisata, karena, seperti tertera pada awal catatan ini, kreativitas warga masyarakat di berbagai daerah terkait pariwisata, bermunculan. Inisiatif dan kreativitas semacam ini, di samping menggembirakan, perlu juga dicemaskan untuk mengingatkan siapapun agar tetap berada dalam jalur kreativitas dan pemberdayaan yang, selain produktif juga menyejahterakan warganya. Di samping itu, setiap potensi pariwisata di daerah, juga di manapun, semestinya merupakan modal yang dapat meningkatkan martabat warga sekitarnya. ■■

Suwarno Wisetrotomo, redaksi Mata Jendela

Narasi eksotisme tidak berhenti di situ. Dengan terus-menerus mengeksotiskan diri sendiri, terjadi reproduksi gagasan usang tentang diri dan liyan sebagai oposisi, bukan interaksi. Dan diri kita saat ini adalah diri masa lalu yang tak berubah, tetap, pasti. Hal ini diperkuat, atau bahkan mungkin dipicu oleh, otonomi daerah dan wacana multikulturalisme. Seiring menguatnya otonomi daerah, semakin besar pula hasrat akan identitas kedaerahan (makanya ada 'putra daerah'); semakin kuat perasaan bahwa daerah satu berbeda dengan daerah lain, punya budaya yang berbeda, punya ciri khas yang berbeda. Multikulturalisme mendukung gagasan dan perasaan seperti itu dengan menekankan keberagaman. Dan narasi keberagaman membawa asumsi kepastian identitas atau bahwa identitas suku, agama, etnis, dan lain-lain adalah entitas utuh yang masing-masing terpisah betul dari yang lain. Maka, baik otonomi daerah maupun multikulturalisme sangat mudah melesetkan kita pada gagasan bahwa budaya sebuah etnis, sebuah daerah, agama, dll. itu tidak berubah, tidak bersifat historis, dan karenanya memiliki kemurnian.

Kita Di Hadapan Pariwisata

Begitu besarnya kekuasaan pariwisata dan begitu problematisnya narasi pariwisata atas budaya dan identitas kita. Dengan latar itu, di manakah posisi kita sebagai masyarakat bekas terjajah, sebagai warga negara berotonomi daerah, sebagai masyarakat yang menginginkan interaksi dengan masyarakat lain secara sejajar dan sehat?

Lisistrata Lusiandiana, alumnus Program Pascasarjana Ilmu Religi dan Budaya Sanata Dharma, pernah

melakukan sebuah penelitian menarik tentang persoalan ini. Ia melihat *backpacker* sebagai sebuah contoh wisata 'alternatif' dan melakukan wawancara dengan para *backpacker* untuk mengetahui pemaknaan mereka atas perjalanan dan atas hidup. Singkatnya, *backpacker* adalah sebuah wahana untuk menemukan makna hidup; sebuah cara untuk menggali identitas diri dan liyan terus-menerus untuk melawan stereotipe dan penghakiman atas liyan. Namun, respondennya adalah warga Amerika dan Eropa yang cenderung memiliki berbagai kemudahan dibanding kita—perbedaan kurs, standar gaji yang lebih tinggi, kemudahan akses ke negara-negara lain, dsb. Penelitian itu mungkin akan lain hasilnya apabila yang diperiksa adalah para *backpacker* Indonesia yang bepergian ke negara-negara lain. Namun, bukan itu poinnya. Penelitian itu memberikan gambaran bahwa sebuah kekuasaan tidak pernah mampu menjaring semua orang; selalu ada celah, selalu yang tidak 'termakan', selalu ada perlawanan.

Narasi pariwisata memang terlalu menekankan perbedaan dan keunikan; tetapi, interaksi dalam dunia wisata memberikan peluang bagi kita untuk terus memikirkan identitas yang terus berubah, untuk terus mengalami persinggungan yang semakin intens dengan warga masyarakat dari belahan dunia lain. Bisa jadi, kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda, yang tidak dibayangkan oleh narasi dominan pariwisata tentang budaya dan identitas kita.

Pariwisata merupakan undangan tak tertulis untuk memaknai terus-menerus identitas dan budaya kita. Dan undangan itu saat ini sudah bercap 'wajib datang'. Mau tidak mau kita harus memenuhi undangan itu.

Namun, kita tidak perlu mengikuti semua aturan yang dicantumkan dalam undangan, tidak perlu termakan dengan pemaknaan formal mereka tentang identitas, juga tidak perlu merendahkan diri terus-menerus atas nama *hospitality* dan devisa negara.

Wacana mengenai budaya dan identitas yang dihadirkan oleh pariwisata hanyalah salah satu sumber pemaknaan saja; sebuah pemaknaan yang dibangun lebih atas dasar kepentingan eksternal (ekonomi) daripada kepentingan pemahaman yang menyeluruh mengenai budaya dan identitas. Namun, karena sifat massifnya yang membuat orang susah mengelak, kita bisa *ngenter* atau *ngeli* (mengikuti arus, tapi tidak terbawa arus) dengan mengeksplorasi lebih dalam lagi produk-produk budaya yang dipertontonkan itu, merumuskan maknanya dulu dan kini, mencoba melihat relevansinya bagi persoalan terkini, dll. Kalau mesti menghadirkan tontonan budaya dalam pariwisata, kita mengerti benar apa yang sedang kita hadirkan.

Namun, eksplorasi itu mestinya tidak didasari oleh semangat pemurnian, semangat untuk mencari keaslian dan akhirnya justru semakin membedakan diri dengan yang lain (mengunikkan diri terus-menerus). Semangat yang lebih positif adalah semangat mencipta tradisi baru atas dasar irisan-irisan satu budaya dengan budaya lain, atas dasar dialog terus-menerus. Dengan begitu, kita bisa melampaui dilema oposisi tradisi-modernitas yang selalu menghantui masyarakat (bekas) jajahan. ■

Wahmuji, penerjemah, staf PUSDEP, dan pengelola mediasastra.com

Pembangunan Kota dan Munculnya Rasa Gelisah

Refleksi tentang Yogyakarta yang Sedang Berubah

In Nugroho Budisantoso

1. Kota yang Berbalik Arah?

"Tumbuh Tak Terkendali, Yogyakarta Butuh Rencana Pembangunan." Ini adalah judul berita pada *Kompas.com*, Selasa, 15 September 2015, yang memuat pendapat Harmen van de Wal, Direktur Krill Architecture, sebuah lembaga bermarkas di Rotterdam Belanda yang *concern* pada masalah tata kota. Dikatakan oleh van de Wal, "Di antara berbagai permukiman baru, desa-kota di Indonesia, khususnya Yogyakarta, adalah salah satu yang paling menggugah rasa ingin tahu arsitek dan peneliti. Pasalnya, Yogyakarta saat ini tengah mengalami perubahan besar yang tidak terencana."

Pernyataan van de Wal bahwa Yogyakarta sedang berubah tetapi tidak dalam perencanaan itu harus diakui merupakan pernyataan yang keras. Sebab, bila itu benar terjadi, masa depan Yogyakarta dan semua yang bergantung padanya akan menjadi taruhan. Yogyakarta mengalami perubahan yang tidak dikehendaki. Kota yang adalah buah cipta manusia-manusia penghuninya tidak lagi berada di bawah kendali kreatornya. Kota dengan segala sistem teknologi, sistem

pasar, dan sistem politik yang melekat padanya secara historis dan struktural justru berpotensi untuk berbalik arah, yaitu mendikte orang-orang yang berdiam di dalamnya agar patuh kepada disorientasi yang berlangsung. Pembangunan kota dengan segala ambisi modernisasinya alih-alih mendorong lahirnya rumah bagi hidup bersama justru mendatangkan aneka bentuk alienasi.

Gejala perbalikan arah antara manusia dan buah ciptanya tersebut sesungguhnya sudah diingatkan oleh Martin Heidegger, filsuf Jerman, melalui artikelnya "*The Question Concerning Technology*" (1977). Heidegger menunjukkan bahwa pada teknologi terdapat modus "*enframing*" yang menjerat manusia untuk mempunyai *setting* pemikiran atau bingkai pandangan yang diambil secara total dari sudut dominasi teknologi—bukan dari sudut pandang dirinya sebagai manusia yang memiliki kebebasan. Dengan demikian, manusia berpotensi kehilangan kemanusiawian dan cara beradanya (*way of being*) di atas dunia.

Tentu saja perlu penyelidikan dan riset lebih lanjut untuk

memeriksa apakah "tak terkendalinya" pertumbuhan Yogyakarta dan "tertinggal-nya" perencanaan kota secara radikal merupakan ekspresi dari perubahan arah hubungan antara di satu sisi manusia yang hidup dan beraktivitas di kota Yogyakarta dan di sisi lain Yogyakarta dengan ke-kota-annya yang melingkupi manusia-manusia urbannya. Tulisan ini tidak akan memasuki wilayah kajian itu, melainkan cukup menghadirkan "peringatan" Heidegger di atas sebagai titik tolak untuk secara pendek membahas geliat pembangunan kota dan rasa gelisah yang menghinggapi para warganya. Pertama, akan ditinjau fenomena gelombang urbanisasi dewasa ini, termasuk yang terjadi di Yogyakarta, bersama dengan terjadinya komplikasi permasalahan di kawasan perkotaan. Kedua, dibahas sejumlah karakteristik perubahan perkotaan, khususnya dengan memperhatikan isu isomorfisme pembangunan kota dan gejala terpisahnya etalase kemajuan dari ruang-ruang yang harus menanggung beban. Sebelum disampaikan suatu catatan akhir, dibahas beberapa inisiatif dalam

meredefinisi *critical position* warga kota di tengah perubahan peri hidup perkotaan yang sedang terjadi.

2. Penduduk Perkotaan Semakin Banyak, Kesejahteraan Semakin Terkonsentrasi

Delapan tahun lalu, *United Nation Population Fund* melaporkan bahwa, pada 2007/2008, untuk pertama kalinya dalam sejarah, lebih dari separuh populasi penduduk dunia bermukim di kawasan urban, yaitu sekitar 3,3 miliar orang (UNFPA, 2007). Diperkirakan bahwa pada 2030 jumlahnya meningkat menjadi sekitar 5 miliar orang, dan dalam kurun waktu 2000 hingga 2030 penduduk urban di Afrika dan Asia meningkat dua kali lipat. Laporan dan prediksi ini menunjukkan isyarat bahwa isu-isu di seputar kependudukan beserta permasalahan-permasalahan yang menyertainya, sejak 2008, lebih berkonteks perkotaan.

Dalam konteks Indonesia, melalui laporan *World Urbanization Prospects. The 2014 Revision* (2014) diketahui bahwa prosentase penduduk urban Indonesia pada 1990 adalah 31% dari seluruh penduduk, yang meningkat menjadi 53% pada 2014. Mengikuti trend ini, diperkirakan pada 2050 sebanyak 71% penduduk Indonesia bermukim di perkotaan. Sementara itu, mengenai tingkat urbanisasi (berdasarkan tiga faktor, yaitu: pertumbuhan penduduk daerah perkotaan, migrasi dari desa ke kota, dan reklasifikasi desa-perdesaan menjadi desa-perkotaan) yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut laporan *Proyeksi Penduduk Indonesia* (2013) terbitan Badan Pusat Statistik (BPS) disebutkan bahwa pada 2010 tingkat urbanisasi di DIY adalah 66,4%, yang meningkat menjadi 70,5%

pada 2015 dan diprediksi melesat menjadi 84,1% pada 2035, jauh di atas rata-rata tingkat urbanisasi di Indonesia pada tahun yang sama, yaitu sebesar 66,6%.

Dengan mengikuti kecenderungan semakin bertambahnya penduduk perkotaan, dapat dibayangkan bahwa berbagai usaha pembangunan kawasan, yang ditempuh demi program-program modernisasi dan merespons aneka permasalahan kependudukan seperti penyediaan lapangan pekerjaan dan perumahan atau pun layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan, terjadi dengan cakupan subjek lebih banyak di kawasan urban. Maka kota menjadi pusat tentang bagaimana potensi-potensi ekonomi dipertumbuhkan yang berjumpa dengan costs dari sudut human development dan environmental integration. Sambil mengingat bahwa secara umum kawasan perkotaan mempunyai spektrum persoalan dan kebutuhan yang lebih beragam, lagi lebih dinamis, daripada kawasan pedesaan, tuntutan-tuntutan yang mengarah ke pengelolaan kota demi sustainabilitas dan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan terpeliharanya lingkungan hidup diperkirakan semakin menjadi lebih besar dan kompleks. Di era ketika desentralisasi diterapkan sebagai modus penataan kehidupan publik, kemampuan mengelola kompleksitas tersebut menjadi tanggungan otoritas lokal perkotaan yang tidak jarang berujung pada terbitnya spirit kompetisi antarkawasan lokal, terutama untuk menunjukkan capaian-capaian pembangunan yang langsung kelihatan oleh mata.

Dalam situasi dengan peningkatan kompleksitas dalam pengelolaan kehidupan urban itu,

menurut UN-HABITAT dalam *State of the World's Cities 2012/2013: Prosperity of Cities* (2013), rupa-rupanya terdapat kecenderungan bahwa kota yang diharapkan menjadi “*home of prosperity*” bagi semua pihak pada akhirnya tersandera oleh pendekatan pembangunan yang menekankan fokus pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini mendorong lahirnya perkotaan sebagai lokasi subur terjadinya kemiskinan ekstrem (*deprivation*), ketimpangan (*inequality*), dan terkonsentrasinya partisipasi (*exclusion*). Sesungguhnya apa yang dilaporkan oleh UN-HABITAT itu tanda-tandanya sudah terjadi pada Yogyakarta. Saat Yogyakarta sedang merayakan, dan rasa-rasanya juga mengagumi, status keistimewaannya sebagai salah satu bagian dari Republik Indonesia, baik melalui pembangunan budaya mental maupun lewat pengorganisasian segi-segi material, hadir lah warta statistika dari BPS tentang betapa tingginya prosentase penduduk miskin di kota budaya dan pendidikan ini. Data BPS mengenai jumlah dan prosentase penduduk miskin menurut provinsi menyebutkan bahwa pada September 2014 prosentase penduduk miskin kota di DIY sebesar 13,36%. Prosentase ini lebih tinggi dari rata-rata prosentase penduduk miskin kota secara nasional, yaitu 8,16%, dan merupakan yang tertinggi di antara provinsi-provinsi di pulau Jawa. Sementara itu, data mengenai gini ratio – yang menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan – untuk Yogyakarta pada 2013 (0,439) adalah lebih tinggi dari gini ratio Indonesia (0,413), dan secara nasional merupakan nomor dua setelah Papua (0,442).

Melonjaknya jumlah orang miskin dan tak terdistribusinya pendapatan secara merata di antara penduduk

tersebut sudah barang tentu ibarat bencana bagi pesona keistimewaan Yogyakarta. Apalagi hal itu terjadi ketika banyak dikabarkan bahwa iklim investasi dan keairahan ekonomi justru sedang menggeliat, serta di tengah aneka agenda kegiatan kota wisata yang berjubel dengan pengunjung dari berbagai penjuru terutama pada hari-hari libur besar. Sambil mengingat pula julukan “*city of tolerance*” pada Yogyakarta, sesungguhnya lalu hati mudah bertanya: Apa yang ditoleransi di situ? Toleransi yang berakar dari perkataan Latin *tolerare* (bersabar, menanggung) sepertinya telah bergeser dan diakarkan pada kata *tollere* (memindahkan, menghapus). Kondisi sosial-ekonomi-budaya Yogyakarta seperti yang secara terbatas disampaikan di atas mengindikasikan berlangsungnya tata kehidupan bersama yang berwajah kurang ramah terhadap kelompok-kelompok rentan dan lebih ramah terhadap kelompok-kelompok mapan. Jika kecenderungan eksklusi perikehidupan ber-kota itu terus terjadi dan investasi masih terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu, sementara gelombang urbanisasi juga terus berlangsung, dapat dibayangkan bahwa ke depan Yogyakarta berpotensi akan berada dalam situasi rawan, khususnya kerawanan di wilayah relasi antarkelompok masyarakat. Terjadinya resistensi warga kota yang mengalami kekurangan air tanah setelah maraknya pembangunan hotel-hotel akhir-akhir ini adalah salah satu gambaran kerawanan sosial yang sudah muncul. Bisa jadi resistensi semacam itu akan berlanjut dan menjadi model gerakan rakyat sipil yang ditiru kelompok-kelompok warga lain menyangkut isu yang berbeda.

3. Semakin Isomorfis dengan Kawasan Lain, tetapi Semakin Ciptakan Disintegrasi di Rumah Sendiri

Rasanya susah untuk menghindar dari kenyataan bahwa wajah fisik kota-kota dewasa ini telah menjadi sedemikian mirip satu dengan yang lainnya. Istilah yang mungkin tepat untuk menggambarkan kemiripan bentuk itu adalah bahwa kota-kota menjadi semakin isomorfis. Begitu memasuki suatu kawasan perkotaan melalui jalan utamanya, termasuk di kota kecil, hampir selalu muncul keramaian, bukan saja menyangkut mobilitas orang-orangnya dengan aneka kendaraan yang menambah polusi udara, tetapi juga terkait dengan hadirnya deretan ruko-ruko yang hari demi hari semakin menguasai kiri-kanan jalanan. Tak terlupa, tentu saja, terpampangnya berbagai macam *billboard*, terutama di lokasi-lokasi strategis berkumpulnya orang seperti perempatan jalan, yang berebut menarik perhatian, lengkap dengan lampu penerang pada waktu malam yang tidak sedikit menghabiskan energi listrik. Kalau itu semua tidak ada di hadapan mata maka itu tandanya sudah bukan kawasan kota.

Dengan mudah akan teramati pula bahwa pada apa yang dipandang sebagai pusat kota, berdiri gedung-gedung bertingkat yang nyaris sama dalam model dan yang sangat mengakomodasi prinsip-prinsip efisiensi dan keberaturan. Sementara itu, rumah-rumah di pemukiman tempat tinggal menampilkan kepadatan populasi dan sesekali tampak bertumpuk tak beraturan, perpaduan kediaman penduduk awal dan deretan kost para pendatang, dengan gang-gang sempit dan selokan atau got kecil kurang terurus. Bahkan di sejumlah sudut, khususnya

daerah-daerah tepian kali, hunian menjadi semakin kelihatan riuh. Tentu masih bisa ditambahkan gambaran lainnya seperti hadirnya mereka yang melewati istirahat malam di pasar, depan pertokoan, atau di ruang-ruang sempit yang masih tersisa. Semuanya memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari di perkotaan.

Adalah kurang bijak kiranya melukiskan wajah kehidupan perkotaan hanya berdasarkan pemaparan sederhana di atas, terutama mengingat pemaparan itu hanya gambaran fisik dari hal-hal yang terpilih saja. Harus diakui bahwa *urban life* bukan hanya sebatas perkara fisik, melainkan juga apa-apa saja yang berada dalam kepala dan hati orang yang terhubung dengan perkembangan perkotaan. Imajinasi orang tentang kota sebetulnya pada masa kini sudah tergiring ke arah suatu citra tertentu, sebagai kombinasi dari kepadatan dan mobilitas, penghancuran yang lama dan munculnya yang belum pernah ada, yang terangkai dengan terpisahnya dua kawasan, yaitu kawasan yang sengaja dikembangkan untuk mendorong iklim usaha/bisnis di bawah payung modernitas dan kawasan perifer yang menanggung eksek dari menjadi “modern”-nya kawasan unggulan. Dengan lain kata, ketika pembangunan kawasan di bawah panji-panji modernitas melahirkan kemiripan dengan kawasan lain, pada waktu yang sama menciptakan disintegrasi di rumah sendiri. Terkait gejala ini, melalui buku *All That Is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity* (1983), Marshall Berman memberikan pandangannya bahwa “... [M]odernity can be said to unite all mankind. But it is a paradoxical unity, a unity of disunity; it pours us all into a maelstrom of perpetual disintegration and renewal, of



struggle and contradiction, of ambiguity and anguish.” (hlm. 15)

Lahirnya kota-kota bercorak isomorfis yang mendewakan efisiensi dan demi pertumbuhan ekonomi itu, menurut telaah Henri Lefebvre melalui bukunya *The Production of Space* (1991 [1974]), merupakan ekspresi dari aparatus negara yang hadir di mana-mana serta yang kebijakannya semakin berciri penguasaan ruang dan “pendiktean” rencana-rencana pembangunan. Sementara itu, isomorfisme juga terjadi dalam berjalannya program desentralisasi dan otonomi daerah. Program yang sejak awal dirancang untuk membuka kesempatan bagaimana lokal dibangun secara kreatif dengan memperhatikan kebutuhan setempat ini, dalam berbagai level, sulit untuk menghindari kecenderungan meng-copy-and-paste kebijakan publik yang sudah berhasil diterapkan di suatu daerah tertentu untuk kemudian diaplikasikan di daerah lainnya bagi satu resep manjur yang cocok untuk berbagai penyakit. Hal ini umumnya terjadi karena minimnya pengetahuan, termarginalisasikannya *resources* untuk penelitian dan pengembangan, serta rendahnya kemampuan para pengelola kawasan untuk melibatkan *local stakeholders* dan menjalankan koordinasi bersama *stakeholders* itu dalam *policy cycles* yang ditempuh

(Sutmuller dan Setiono, 2011). Pengelolaan hidup bersama di aneka kawasan yang berbeda-beda lalu tampak menjadi semakin berciri rasional-positivistik, kurang berdasar kebutuhan, dan tidak kontekstual. Maka tidak mengherankan bahwa *policy transfer* yang sesungguhnya dapat ditempuh dengan proses *learning* atau adaptasi malahan lebih sering ke arah terjadinya imitasi atau adopsi.

Apa yang terjadi di Yogyakarta rasanya berada tak jauh-jauh amat dari penggambaran *trend* di atas. Dari sekian kali studi banding yang dilakukan oleh pemerintah daerah, misalnya, dapat dievaluasi berapa banyak yang akhirnya pada taraf implementasi sungguh berakar dan sambung dengan konteks lokal serta berapa banyak yang berujung pada imitasi. Bahkan dalam arti tertentu, Yogyakarta seperti ketambahan beban dilema ketika pembangunan demi menjawab tuntutan modernitas, pertumbuhan ekonomi, dan gaya yang *up to date* berjumpa dengan tarikan untuk mempertahankan identitasnya sebagai pelestari warisan budaya Jawa Mataram dari masa lalu yang diyakini sarat dengan nilai luhur dan yang menjadi akar identitasnya yang unik. Dilema Yogyakarta itu sesungguhnya bersumber dari dilema-dilema praktis yang secara inheren melekat pada proyek modernisasi itu sendiri yang,



menurut David Harvey dalam buku *The Condition of Postmodernity* (1990), mengungkapkan secara simultan karakter “*destructively creative*” dan “*creatively destructive*”. Secara karikatural Harvey berujar, “*How could a new world be created, after all, without destroying much that had gone before? You simply cannot make an omelette without breaking eggs, ...*” (1990: 16).

4. Critical Position Warga Kota dan Right to the City

Pembangunan kawasan yang menimbulkan ironi seperti yang diungkapkan di atas secara substansial semakin menunjukkan gelagat tertentu bahwa, walau kompleksitas kehidupan perkotaan semakin disadari, tetapi bersamaan dengan itu berbagai cara pendekatan pada realitas dan aneka rekayasa pengendalian sosial yang ditempuh hampir selalu tampak gagap. Proses demokratisasi cum desentralisasi dan diaplikasikannya bentuk-bentuk teknologi terbaru untuk menopang akuntabilitas yang dinilai mampu menjawab persoalan ternyata tidak sepi kesulitan dan persoalan. Nick Devas dalam buku *Urban Governance, Voice and Poverty in the Developing World* (2004) menggarisbawahi bahwa, berada dalam kompleksitas permasalahan yang berkembang, tata pemerintahan kota memang semakin mempunyai peranan yang krusial



dalam mencegah agar golongan miskin di perkotaan tidak semakin terpuruk di kemiskinan mereka, tetapi juga pada waktu yang sama kebijakan-kebijakan pemerintahan justru juga bisa semakin memperparah keadaan. Dengan demikian usaha-usaha pembangunan kota tidak serta merta mendatangkan kecerahan sebab bisa jadi memunculkan kegelisahan di sana-sini.

Devas (2004) menegaskan bahwa aspek-aspek yang menunjang pembangunan kualitas hidup warga kota tidak melulu secara monologis berada di bawah kontrol pemerintah, melainkan juga di bawah pengaruh kekuatan-kekuatan lain seperti pasar dan sektor privat serta gerakan masyarakat sipil. Dalam interaksi dan relasi antara elemen-elemen yang berpengaruh terhadap kualitas hidup warga kota tersebut, sesungguhnya ditentukan bagaimana kota dikelola dan digerakkan ke arah penjaminan bahwa kota akan menjadi “*home of prosperity*” bagi semua. Oleh karena itu *locus* strategis otoritas pemerintah kota sebenarnya tidak berada di mana-mana dengan program-program yang sudah ditentukan secara *top-down*, melainkan berada di wilayah pengelolaan kekuatan dan sumber-sumber daya yang secara historis dan aktual hadir di kota. Pada titik ini, kita diingatkan dengan gagasan Lefebvre

(1996 [1968]) mengenai keikutsertaan warga kota dalam mewujudkan *right to the city*.

Kalau warga kota gelisah terhadap perubahan yang sedang terjadi di kotanya, sebenarnya kegelisahan itu bisa dibaca dari dua segi: kegelisahan yang terkait dengan ketidakberdayaan dan kegelisahan yang mendorong keberdayaan. Kegelisahan jenis pertama boleh dikatakan muncul dari cara pandang yang masih terbelenggu pemahaman bahwa warga kota adalah pihak penerima dari apa pun yang disediakan pemerintahnya. Dengan lain kata, warga menempatkan diri sebagai objek dalam rimba persoalan kota atau menjadi kaum penunggu. Sedangkan, kegelisahan kedua muncul dari cara pandang bahwa warga adalah subjek yang menciptakan ruang hidup di kotanya, atau warga sebagai kaum penentu. Pada pengertian kedua ini gagasan Lefebvre bertumpu.

Menurut Don Mitchell (2003), gagasan Lefebvre mengenai *right to the city* telah melahirkan paradigma baru yang menantang struktur-struktur sosial dan politik yang belakangan tumbuh di perkotaan. *Right to the city* mencakup cara pandang bahwa kota adalah berkarakter publik sehingga di situ terdapat arena interaksi sosial yang hidup, bahwa kepublikan kota terhubung erat dengan realitas

“*The Scream*” (1893) karya Edward Munch
Sumber: <http://totallyhistory.com/the-scream/>

Simpang Tugu Yogyakarta pada suatu siang akhir Juni 2015 tampak sibuk dan penuh dengan kendaraan. Tugu Pal Putih yang menjadi *land mark* kota Yogyakarta berada dalam satu kawasan dengan hotel-hotel yang baru dibangun. Kabel-kabel jaringan listrik dan telepon turut pula menghiasi pemandangan.
Sumber: In Nugroho Budisantoso

Halaman Harian *Tribun Jogja* pada 9 Oktober 2013 tentang “Adu Cepat Bangun Mall” dan “Ketidakseimbangan Wilayah Perkotaan” yang pernah diunggah oleh akun *needforspeed* pada website <http://www.skyscrapercity.com/>.

“Sebelum Semua Ruang Diukur dengan Uang” adalah judul theme song untuk gerakan bertajuk Taman Tiban yang diselenggarakan pada 1 November hingga 10 Desember 2015 di Jogja National Museum (JNM). Gerakan Taman Tiban adalah sebuah gerakan yang diprakarsai oleh komunitas ketjilbergerak Yogyakarta dan yang mengajak anak-anak muda untuk menggunakan seluruh sudut kota sebagai ruang bermain dan belajar.
Sumber: <http://www.ketjilbergerak.org/>

heterogen dari para warganya di mana kemajemukan diyakini mengembangkan kualitas kehidupan bersama dan menjadi sumber dari kesejahteraan, serta bahwa perbedaan-perbedaan yang ada menumbuhkan usaha keras dan perjuangan para warga untuk membentuk kotanya sesuai dengan yang mereka harapkan. Adapun bagi Harvey (2008: 23), “*The right to the city is far more than the individual liberty to access urban resources: it is a right to change ourselves by changing the city. ... The freedom to make and remake our cities and ourselves is, I want to argue, one of the most precious yet most neglected of our human rights.*”

Pendapat Harvey bahwa *right to the city* adalah lebih daripada kebebasan individual dan berupa kebersamaan berbagai pihak untuk mengubah diri dengan mengubah kota tersebut kiranya terhubung dengan gagasan Lefebvre (1991 [1974]) tentang perjuangan kelas dengan “*capacity to differentiate*” di dalam

menciptakan ruang hidup alternatif yang bermakna bagi kehidupan warga dan yang tidak diturunkan dari idea pertumbuhan ekonomi. Kata Lefebvre, *“Today more than ever, the class struggle is inscribed in space. Indeed, it is that struggle alone which prevents abstract space from taking over the whole planet and papering over all differences. Only the class struggle has the capacity to differentiate, to generate differences which are not intrinsic to economic growth qua strategy, ‘logic’ or ‘system’ - that is to say, differences which are neither induced by nor acceptable to that growth.”* (hlm. 55)

5. Perubahan Tanpa Agen?

Perubahan sosial di Yogyakarta pernah ditelaah oleh begawan sosiolog Selo Soemardjan (1981). Perubahan sosial di Yogyakarta yang terjadi dalam konteks penjajahan Belanda, saat penjajahan Jepang, dan masa Yogyakarta dalam NKRI itu, menurut Soemardjan, amat ditentukan oleh kehadiran Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan kaum terpelajar sebagai agen perubahan – walau juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain di luar kendali Sri Sultan dan kaum terpelajar. Keberadaan agen perubahan itu memberi kerangka yang bermakna secara sosial bagi kalangan masyarakat yang lebih luas tentang bagaimana perubahan dilalui dalam aneka situasi yang sering tidak jelas ujung pangkalnya sehingga situasi itu menjadi lebih dikuasai daripada menguasai masyarakat. Dalam rumusan lain, keberadaan agen perubahan sanggup mengubah ketertundukan pasif kepada disorientasi yang melingkupi masyarakat menjadi gairah aktif masyarakat untuk menciptakan masa depannya di tengah situasi yang mudah berbalik arah.

Yogyakarta masa kini dengan

fenomena perubahan yang sedang terjadi atasnya, menurut terminologi van de Wal, adalah “Yogyakarta yang tengah mengalami perubahan besar yang tidak terencana”. Dalam terminologi yang diberikan oleh van de Wal itu dapat dibaca dua hal tegas, yaitu (1) sedang terjadinya perubahan (*existing change*) di Yogyakarta dan (2) tidak teramatinya pengelolaan sistematis (*unseen or not transparent governance*) yang ditempuh dalam mengawal perubahan yang sedang terjadi. Bercermin pada telaah Soemardjan, perubahan masa kini yang sedang terjadi di Yogyakarta sepertinya tidak, atau sekurang-kurangnya belum, memperoleh kehadiran agen perubahan yang memadai. ■■

In Nugroho Budisantoso, *Pengajar dan Koordinator Lingkar Studi di Universitas Sanata Dharma*

Rujukan

- Badan Pusat Statistik, 2013, *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*, dapat diakses pada: <http://www.bps.go.id/index.php/publikasi/16>
- _____, 2015, “Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, September 2014,” dapat diakses pada: <http://www.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/1488>
- _____, 2015, “Gini Ratio Menurut Provinsi Tahun 1996, 1999, 2002, 2005, 2007-2013,” dapat diakses pada: <http://www.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/1493>
- Berman, M., 1983, *All That Is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity*, London: Verso
- Devas, N., 2004, *Urban Governance, Voice and Poverty in the Developing World*, London: Earthscan
- Harvey, D., 1990, *The Condition of Postmodernity*, Cambridge: Blackwell

_____, 2008, “The Right to the City,” dalam *New Left Review*, Sept/Oct 2008, hlm. 23-40

Heidegger, M., 1977, “The Question Concerning Technology,” dalam M. Heidegger, *Basic Writings*, Edited by David Krell, New York: Harper and Row

Kompas.com, 2015, “Tumbuh Tak Terkendali, Yogyakarta Butuh Rencana Pembangunan,” dapat diakses pada: <http://properti.kompas.com/read/2015/09/15/090000921/Tumbuh.Tak.Terkendali.Yogyakarta.Butuh.Rencana.Pembangunan>

Lefebvre, H., 1991, *The Production of Space*, Translated by Donald Nicholson-Smith, Oxford: Basil Blackwell, Originally published 1974

_____, 1996, “The Right to the City,” dalam H. Lefebvre, *Writings on Cities*, Translated and edited by Eleonore Kofman and Elizabeth Lebas, Oxford: Basil Blackwell, hlm. 147-159, Originally published 1968

Mitchell, D., 2003, *The Right to the City: Social Justice and the Fight for Public Space*, New York: The Guilford Press

Soemardjan, S., 1981, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Sutmuller, P. M. dan I. Setiono, 2011, “Diagnostic on Evidence-based Public Policy Formulation under Decentralisation,” AusAID’s Tertiary Education and Knowledge Sector Unit, dapat diakses pada: <https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/indo-ks6-decentralisation.pdf>

UN-HABITAT, 2013, *State of the World’s Cities 2012/2013: Prosperity of Cities*, dapat diakses pada: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/745habitat.pdf>

UNFPA, 2007, *State of World Population 2007: Unleashing the Potential of Urban Growth*, dapat diakses pada: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/695_filename_sowp2007_eng.pdf

United Nations, 2014, *World Urbanization Prospects. The 2014 Revision*, dapat diakses pada: <http://esa.un.org/unpd/wup/highlights/wup2014-highlights.pdf>

Galeri Seni Kontemporer Sebagai Agen Persebaran Pengetahuan

Venti Wijayanti

SEPERTI yang akan terpapar dalam makalah ini, pengelolaan kebudayaan bukanlah perkara yang sederhana, bukan saja karena kebudayaan itu begitu kompleks penuh perubahan sehingga butuh penyederhanaan, tetapi juga karena budaya itu pada dasarnya laten atau tidak kasat mata.

Jogja sebagai kota pariwisata memiliki ikon-ikon kota yang akrab bagi semua turis yang berkunjung ke Jogja. Bisa disebutkan, antara lain Malioboro, pantai Parangtritis, candi Prambanan, dan masih ada beberapa lagi tempat wisata yang menjadi ikon kota kawasan Jogja. Ikon-ikon ini yang menjadi identitas pariwisata Jogja bagi pariwisata turisme Jogja. Jogja sebagai kota pariwisata turisme sudah lama sekali arab dengan peningkatan angka kunjungan wisatawan dari turis domestik sampai internasional. Dari sini berarti Jogja sebagai kota memiliki keunikan tersendiri, yang menjadi daya tarik kota. Jika dilihat dari kuantitas wisatawan yang berkunjung di Jogja semakin tahun jumlahnya terus meningkat. Gelombang arus wisatawan semakin tak terkendali, karena hampir setiap waktu selalu ada saja wisatawan. Padahal bisa kita yakini bersama bahwa para wisatawan tersebut akan selalu saja mengunjungi tempat wisata yang menjadi ikon di kota Jogja, seperti yang tadi disebutkan.

Daya tarik Jogja sebagai kota pariwisata tak bisa dipisahkan dari bentuk kultural kota ini. Semua bentuk kultural yang ada di Jogja menjadi daya tarik Jogja sebagai kota pariwisata, dan juga julukan kota lainnya, seperti kota pelajar, kota budaya, dan kota seni. Jogja dilihat dari

sudut pandang kultural dan sebagai kota seni memang tak dapat ditolak. Kedua hal ini menjadi penting jika ingin memasuki bentuk kesinambungan antara batas kultural dan seni sebagai cara untuk menyikapi fenomena sosial. Hal ini menjadi titik keistimewaan Jogja, dimana itu semua telah membentuk sebuah ritme hidup yang berbeda dengan kota-kota lainnya. Karena itu, terdapat berbagai usaha dari pemerintah daerah untuk memdorong terbentuknya sarana pariwisata yang memadai dari Jogja. Hal ini tidak dapat sepenuhnya terlaksana dengan maksimal karena berbagai alasan dan lain hal. Jalan keluarnya adalah ruang publik yang dibuat oleh orang non pemerintahan yang terdiri dari seniman, orang kreatif, dan akademisi.

Jogja dengan ruang alternatif yang terwujud dalam bentuk wisata seni kontemporer, memiliki fungsi yang sama dengan pariwisata tetapi bisa dikatakan memiliki akses yang masih terbatas. Hal ini dikarenakan oleh sekat antar ruang pada dinamika sosial masyarakat. Bentuk sekat ini mulai diperhatikan dengan bentuk program publik di setiap ruang alternatif tersebut yang melibatkan masyarakat umum, maupun pelajar. Bentuk seperti ini bisa dimaksimalkan menjadi program rutin yang dikembangkan sebagai strategi untuk mengenalkan ruang alternatif. Jenis ruang alternatif